



BADAN POM

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BALIKPAPAN**

RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

0542 - 8793169

balaipom.balikpapan@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Balikpapan tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik dan lancar.



Dokumen Renstra ini merupakan wujud komitmen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Badan POM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penyusunan Renstra ini mengacu pada arahan strategis nasional, kebijakan pemerintah daerah, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan, sekaligus menjadi landasan untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Renstra 2025 – 2029 diharapkan dapat meraih peluang dan menjawab tantangan yang ada di lingkungan strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun sehingga fungsi pengawasan bisa ditingkatkan dan mempunyai daya ungkit dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat di wilayah kerja meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik konstruktif demi peningkatan kualitas perencanaan dan

pelaksanaan pengawasan obat dan makanan pada wilayah pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra 2025 – 2029 ini, semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.

Balikpapan 09 Desember 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Balikpapan,



Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BALIKPAPAN

NOMOR HK.02.02.29B.12.25.110 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Balikpapan tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BALIKPAPAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Balikpapan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Balikpapan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Balikpapan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Balikpapan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Balai POM di Balikpapan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 09 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN,



GERSON PARARAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BALIKPAPAN	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL.....	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Kondisi Umum	11
1.1.1 Capaian Oleh Unit Organisasi dan Satker pada Periode Renstra 2020-2024	16
1.1.2 Aspirasi Masyarakat/Stakeholder.....	45
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	46
1.2.1 Kekuatan (<i>Strength</i>).....	47
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	52
1.2.3 Peluang (<i>Oppurtunity</i>).....	54
1.2.4 Ancaman (<i>Threat</i>).....	58
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	63
2.1 Visi	63
2.2 Misi	64
2.3 Tujuan	66
2.4 Sasaran Program/Kegiatan	69
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	82
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	82
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Organisasi/Satker	84
3.2.1 Arah kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan	84
3.2.2 Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN	97
4.1 Target Kinerja	97

4.2	Kerangka Penandaan.....	101
BAB V	PENUTUP	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai POM di Balikpapan	14
Gambar 1.2	Hasil Analisis SWOT	62
Gambar 2.1	Misi Presiden 2025 - 2029	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Indikator Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Balikpapan Tahun 2022 - 2024	20
Tabel 2.1	Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....	68
Tabel 2.2	Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Balikpapan periode 2025-2029.....	74
Tabel 2.3	Indikasi Risiko Sasaran Kinerja BPOM di Balikpapan.....	77
Tabel 3.1	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan 2025-2029	96
Tabel 4.1	Sasaran Strategis, indikator, dan Target Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan tahun 2025-2029.....	101
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan 2025-2029	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yang mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional Republik Indonesia. BPOM berperan penting dalam memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia aman berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat melalui evaluasi keamanan, mutu dan efikasi yang ketat. Hal tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPOM dilaksanakan oleh Kedeputian, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa seluruh Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota, salah satunya UPT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Balikpapan memiliki wilayah kerja 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

1) Luas Wilayah Kerja (km²)

a) Kota Balikpapan

Memiliki luas wilayah sebesar 511.01 km² dan jumlah penduduk sebanyak 753.532 jiwa, terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan dengan kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan dengan

wilayah terluas dan kecamatan Balikpapan Tengah merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dan Luas Pengelolaan Laut 160,10 km².

b) Kabupaten Penajam Paser Utara

Memiliki luas wilayah sebesar 3.060,82 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.566 jiwa, terdiri dari 4 kecamatan dan 54 desa/kelurahan demham Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil.

c) Kabupaten Paser

Memiliki luas wilayah sebesar 10.851,8 km² dan jumlah penduduk sebanyak 303.424 jiwa, kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang terdiri dari 139 desa dan 5 kelurahan dari jumlah desa/kelurahan tersebut, Kecamatan Long Ikis mempunyai jumlah desi/kelurahan terbanyak yaitu 26 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai jumlah desa paling sedikit yaitu 7 desa, Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 85.087 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Muara Samu merupakan wilayah degan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 7.770 jiwa.

2) Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, Loka POM di Kota Balikpapan mencatat total sebanyak 5.133 sarana dan 120.421 jumlah murid SD yang menjadi sasaran pengawasan yang sudah mencakup wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Industri farmasi	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	2
3	Industri obat tradisional (IOT)	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	0

6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	0
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0
10	Industri kosmetik	5
11	Industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik	0
12	Industri pangan	22
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	2.632
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	19
15	Apotek	337
16	Toko obat	114
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	3
18	Rumah sakit	20
19	Puskesmas	57
20	Klinik	172
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0
22	Kantor Kesehatan Pelabuhan	1
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	180
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	21
25	Fasilitas distribusi kosmetik	337
26	Klinik kecantikan	37
27	Sarana peredaran pangan olahan	648
28	Jumlah sekolah	526
29	Jumlah murid SD menurut kabupaten/kota	120.421
JUMLAH		4606

3) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Balai POM di Balikpapan per tanggal 25 November 2025 sebanyak 17 Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Balai POM di Balikpapan memiliki Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) sebanyak 6 orang pegawai. Selain itu dalam upaya menunjang kegiatan pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan dilakukan mekanisme pengadaan jasa outsourcing melalui *e-catalog* sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 orang staf administrasi, 1 orang tenaga pengemudi, 3 orang petugas keamanan, dan 1 orang petugas kebersihan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 10 menjelaskan bahwa susunan organisasi Balai POM terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Balikpapan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang meliputi pengawasan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat bahan alam, kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Adapun wilayah pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan yaitu tiga

kabupaten/kota meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan pangan olahan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan serta fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan
- e. Pelaksanaan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
- g. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
- h. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring
- i. Pengelolaan komunikasi, informasi dan edukasi, serta pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Badan POM memiliki kontribusi signifikan di bidang kesehatan publik yaitu Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ketat sehingga dapat mencegah peredaran produk yang berbahaya dan menjamin masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko

kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar.

BPOM selalu bertransformasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman terutama pertumbuhan pesat dan kompleksitas Industri Sediaan farmasi dan pangan olahan. Meningkatnya inovasi teknologi, globalisasi, perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hal tersebut menjadikan pentingnya Pengembangan Rencana Strategis BPOM tahun 2025-2029.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan ikut serta dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sejalan dengan Renstra BPOM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kewilayahan pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan. Renstra BPOM dan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan ini dirancang sebagai respon terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta untuk mengantisipasi perubahan masa depan di bidang Industri sediaan farmasi dan makanan agar tetap relevan dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Renstra BPOM dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan 2025-2029 menjadi komitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sebagai UPT Badan POM akan memastikan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kerja memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

1.1.1 Capaian Oleh Unit Organisasi dan Satker pada Periode Renstra 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan kegagalan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT															
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	88,40	95,05	93,5	94,50	101,07	90,50	95,71	105,76	91.00	100	109.89	98,6	95,39	96,75
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	102,56	80,00	98,00	122,5	82,00	92,54	112,85	84.00	86.57	103.06	90,3	97,01	107,44
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	88,00	98,88	89,5	90,38	100,98	90,00	86,67	96,30	90.50	97.92	108.20	96,7	94,92	98,15
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	60,00	75,00	73,00	85,71	117,41	75,00	90,48	120,64	76.00	91.20	120.00	95,24	93,10	97,76
Sasaran Strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	99,78	113,39	89,00	100	112,36	100,00	100,00	100,00	100	100	100.00	100	100,00	100,00
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,00	71,00	126,79	62,00	87,12	140,52	76,00	43,59	57,36	80.00	85.00	106.25	85	89,09	104,81
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	87,50	102,94	88,00	100	113,64	91,00	86,67	95,24	94.00	100	106.38	100	100,00	100,00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47,00	61,00	129,79	50,00	66,67	133,34	66,00	52,17	79,05	70.00	54.17	77.39	75	65,38	87,18

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	75,60	126,00	63,00	72,00	114,29	77,00	65,50	85,06	79,00	67,89	85,94	84	90,94	108,26
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77,00	77,00	100,00	79,00	94,80	120,00	100	100,00	100,00
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	100,00	105,26
Sasaran Strategis III : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,15	87,36	97,99	90,94	91,73	100,87	92,40	93,24	100,91	93,3	96,86	103,8	97,7	96,11	98,37
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	90,10	180,2	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	81,67	163,34	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00	100

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89,00	100,00	112,36	91,00	100	109,89	98,00	57,50	58,67	99	100	101	100	100,00	100,00
Sasaran Strategis VI : Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal															
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	163,64	163,64	100,00	100	100	80,60	93,31	115,77	100	100	100	100	100	100,00
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,2	76,27	92,79	74,29	77,04	103,70
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,36	69,13	109,11
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	108,82	108,82	100,00	146,67	146,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Sasaran Strategis VII : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	93,7	104,11

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis VIII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	82,38	109,84	77	86,25	112,01	85,25	84,71	99,37	85.5	90.21	105.5	90,08	86	95,47
Sasaran Strategis IX : Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
Indeks Pengelolaan data dan Informasi Loka POM di Kota Balikpapan yang Optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	2,50	111,11	2.5	3	120	3	3,00	100,00
Sasaran Strategis X : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-	-	-	90,60	96,05	106,02	91.8	99.05	107.9	89,82	94,57	105,29
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	75	107.14
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	94,16	136,46
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	90,1	150,17
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00	100,00	105,26	95,00	100	105,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.1 Realisasi Indikator Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun 2022-2024

Balai POM di Balikpapan pada tahun 2024 memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

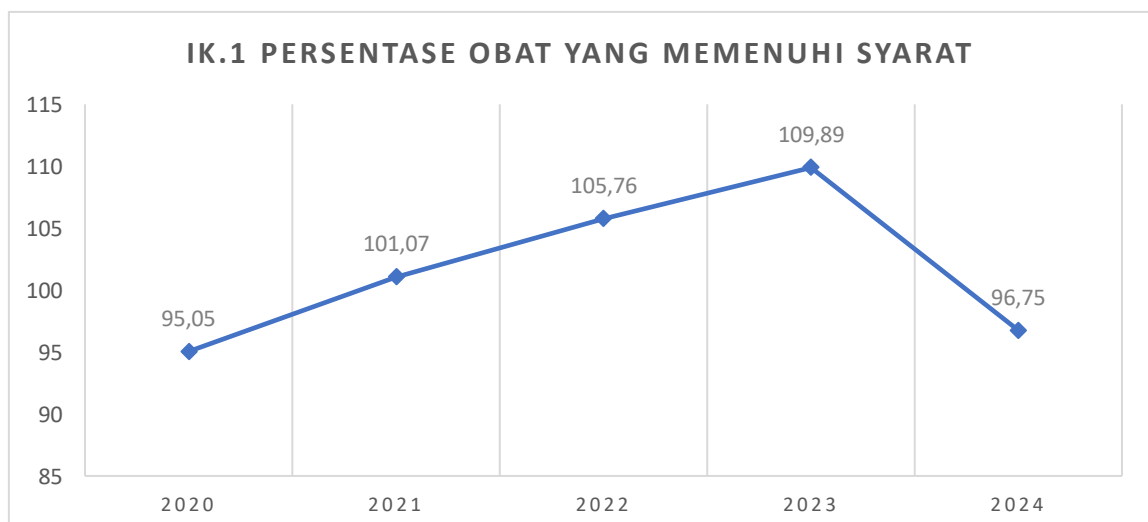
Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Balikpapan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Balikpapan akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

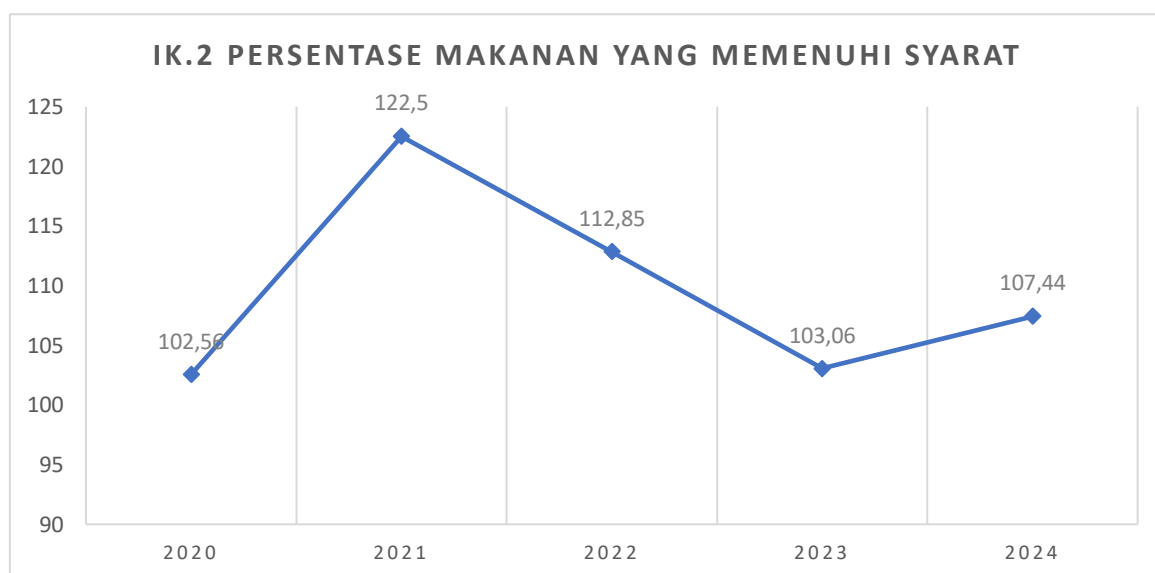
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standarisasi, Penilaian (pre-market evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Balai POM di Balikpapan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dengan tugas melaksanakan tugas teknis operasional pre-market dan post market di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Balikpapan dilakukan selaras dengan sasaran IKU Badan POM untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu melalui Sasaran kegiatan (SK1).

IK.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat



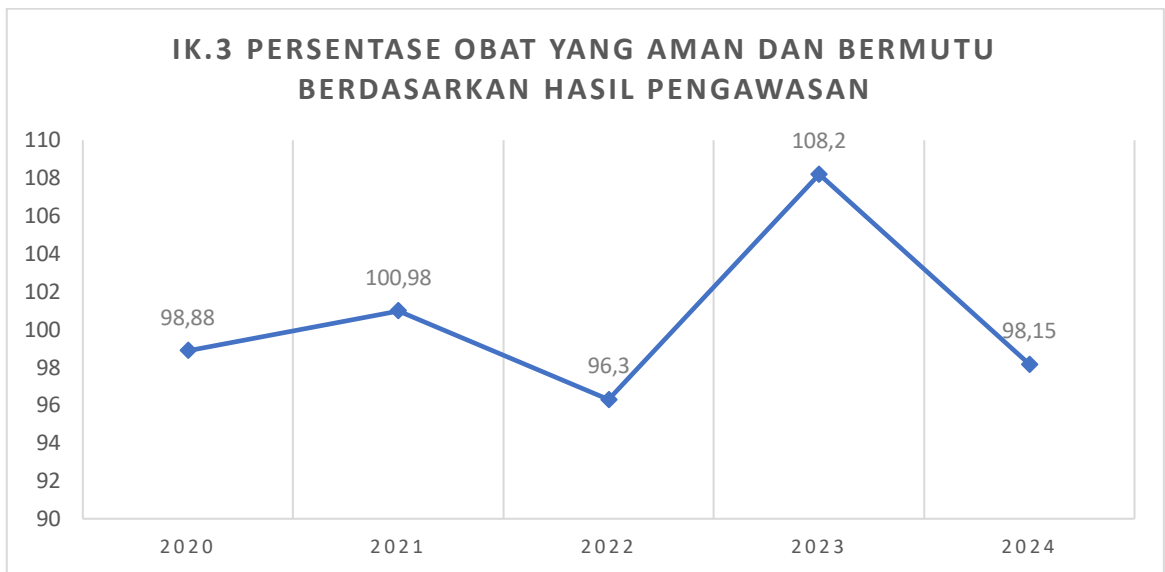
Tren capaian IK.1 menunjukkan peningkatan mutu obat hingga tahun 2023, dengan kenaikan konsisten dari 95,05% (2020) menjadi 109,89% (2023). Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang berjalan optimal. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 96,75%, yang mengindikasikan meningkatnya temuan obat tidak memenuhi syarat atau adanya perubahan pola pengawasan. Meski demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, sehingga mutu obat secara umum tetap terjaga. Secara keseluruhan, kinerja pengawasan obat menunjukkan hasil positif dalam jangka panjang, dengan penurunan di tahun terakhir yang perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penguatan strategi pengawasan.

IK.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat]



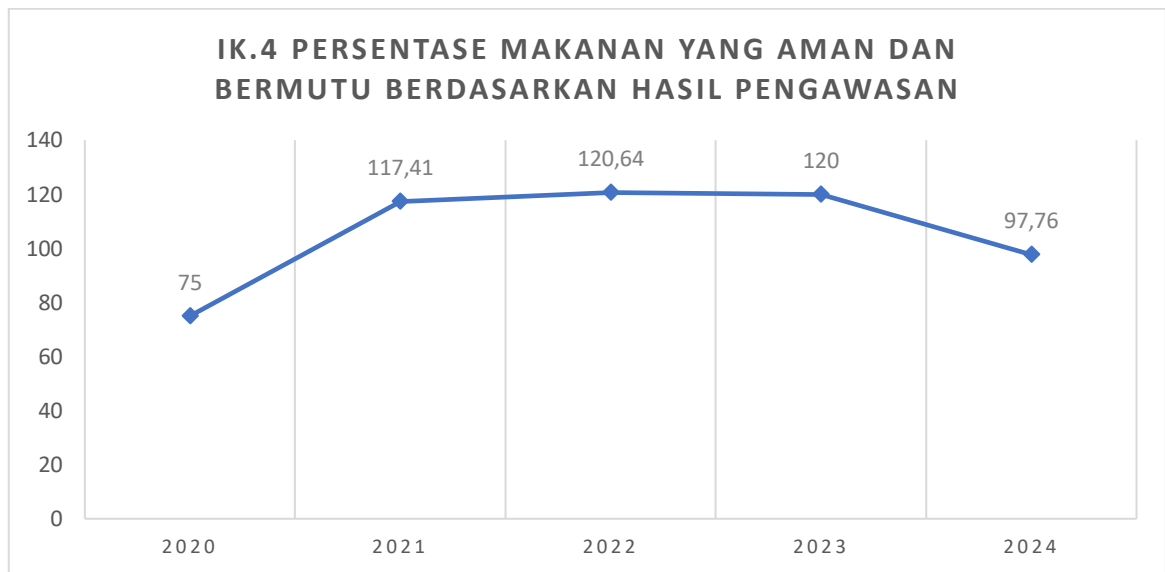
Tren capaian IK.2 menunjukkan kenaikan signifikan dari 102,56% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya 122,5% di tahun 2021, mencerminkan efektivitas pengawasan pangan serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pada periode tersebut. Namun setelah itu terjadi penurunan bertahap pada 2022–2023 hingga mencapai 103,06%, yang mengindikasikan meningkatnya temuan ketidaksesuaian atau adanya perubahan pola sampling dan intensitas pengawasan. Pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 107,44%, menunjukkan perbaikan kinerja pengawasan dan penurunan temuan pangan tidak memenuhi syarat dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun sempat menurun, tren lima tahun terakhir tetap menggambarkan pengawasan pangan yang relatif stabil dan berada pada tingkat mutu yang baik, dengan upaya perbaikan berkelanjutan yang mulai terlihat kembali pada 2024.

IK.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Tren capaian IK.3 menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami peningkatan dari 98,88% pada tahun 2020 menjadi 100,98% pada 2021, capaian turun menjadi 96,3% pada 2022, yang mencerminkan meningkatnya temuan obat tidak aman atau tidak bermutu pada tahun tersebut. Pemulihan yang kuat terjadi pada 2023 dengan kenaikan signifikan hingga 108,2%, menggambarkan keberhasilan penguatan pengawasan serta efektivitas tindak lanjut terhadap temuan sebelumnya. Namun, capaian kembali menurun pada 2024 menjadi 98,15%, meski masih berada pada tingkat yang relatif stabil dan mendekati capaian tahun awal. Secara keseluruhan, kinerja indikator ini menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh intensitas pemeriksaan dan kualitas obat yang beredar, dengan hasil pengawasan yang tetap berada dalam kategori baik meskipun terjadi fluktuasi antar tahun.

IK. 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Tren capaian IK.4 menunjukkan peningkatan yang sangat kuat dari 75% pada tahun 2020 menjadi 117,41% pada 2021, kemudian stabil pada level tinggi di 2022 dan 2023 dengan capaian di atas 120%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penguatan pengawasan, efektivitas pembinaan pelaku usaha, serta perbaikan mutu pangan yang beredar di wilayah pengawasan. Namun pada tahun 2024 capaian menurun menjadi 97,76%, mengindikasikan meningkatnya temuan ketidaksesuaian atau adanya perubahan strategi sampling yang lebih ketat. Meski demikian, capaian 2024 masih berada jauh di atas capaian tahun awal, menunjukkan bahwa secara umum mutu pangan tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, indikator ini memperlihatkan kinerja pengawasan yang kuat, dengan penurunan pada tahun terakhir yang perlu menjadi fokus evaluasi dan penguatan tindak lanjut.

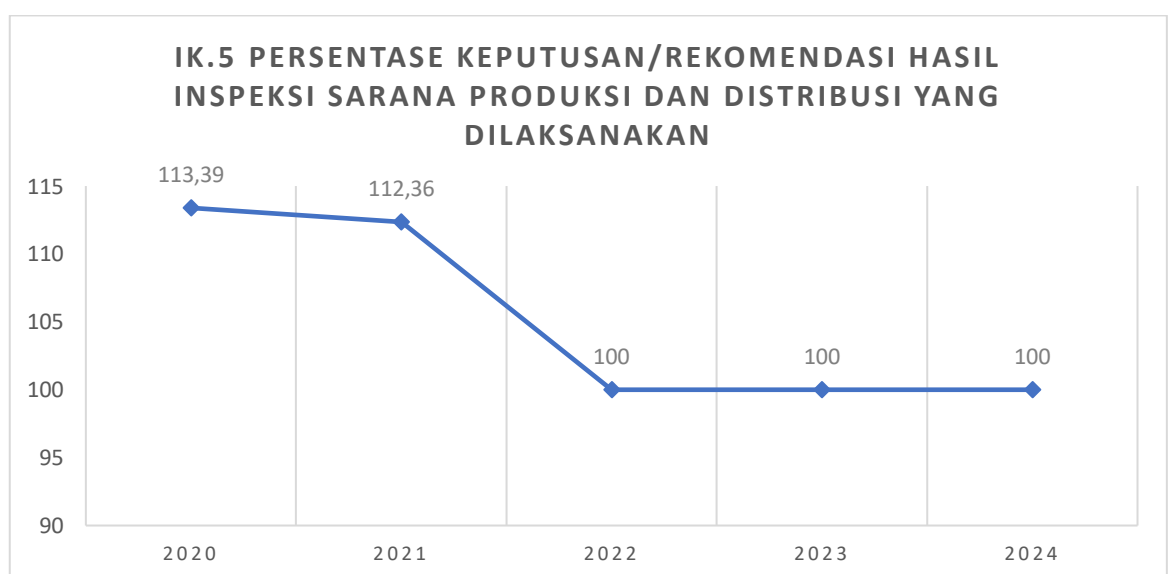
2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Balikpapan akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

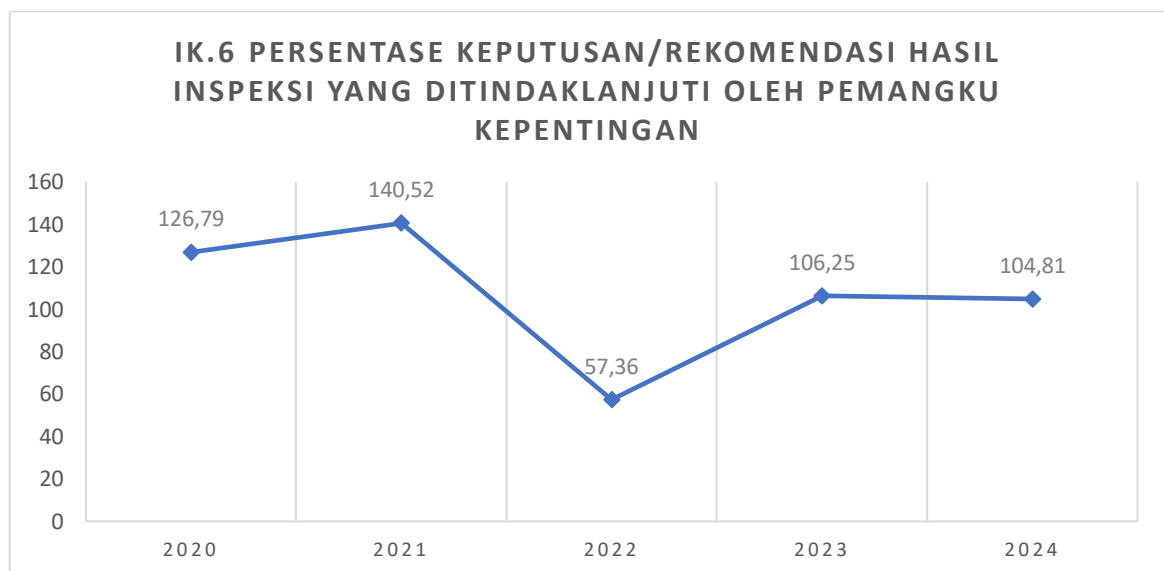
Capaian sasaran kegiatan diukur dengan semua indikator kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik; (7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

IK.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



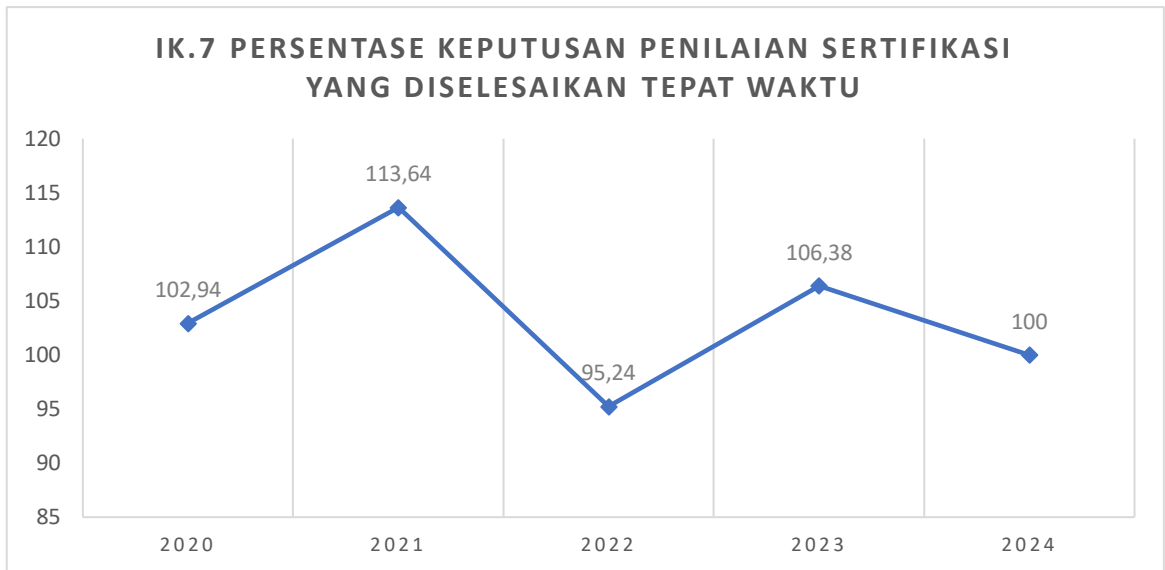
Tren capaian IK.5 menunjukkan penurunan dari 113,39% pada tahun 2020 menjadi 112,36% pada 2021, lalu turun signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2022. Capaian stabil pada angka 100% di tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa seluruh keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi telah dilaksanakan sesuai target minimal. Penurunan pada 2022 lebih mencerminkan penyelarasan capaian terhadap target yang telah ditetapkan, bukan menurunnya kinerja operasional. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan tindak lanjut inspeksi pada tiga tahun terakhir, menandakan bahwa proses pengawasan, dokumentasi, dan eksekusi rekomendasi telah berjalan secara efektif dan sesuai standar kinerja organisasi.

IK.6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



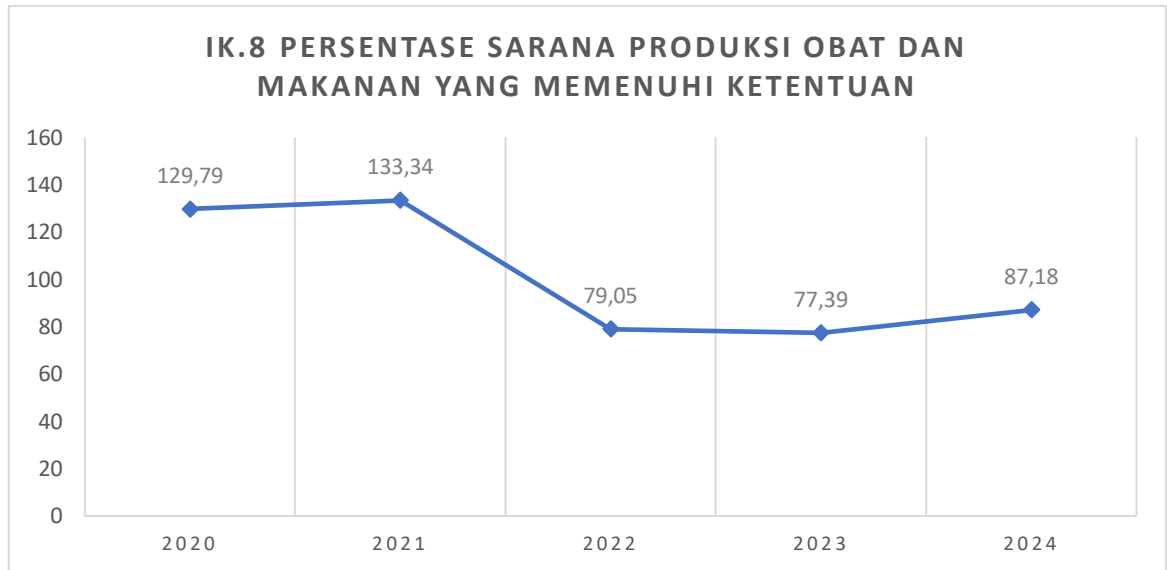
Tren persentase tindak lanjut hasil inspeksi menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024, dimulai dengan kinerja yang sangat tinggi (126,79% hingga 140,52%) pada tahun 2020-2021, diikuti oleh penurunan drastis hingga mencapai titik terendah 57,36% pada tahun 2022. Namun, kinerja berhasil pulih dengan kuat di tahun 2023 menjadi 106,25% dan kemudian stabil di angka tinggi (104,81%) pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa setelah mengalami kendala serius di tahun 2022, organisasi berhasil kembali ke tingkat kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut di atas target.

IK.7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



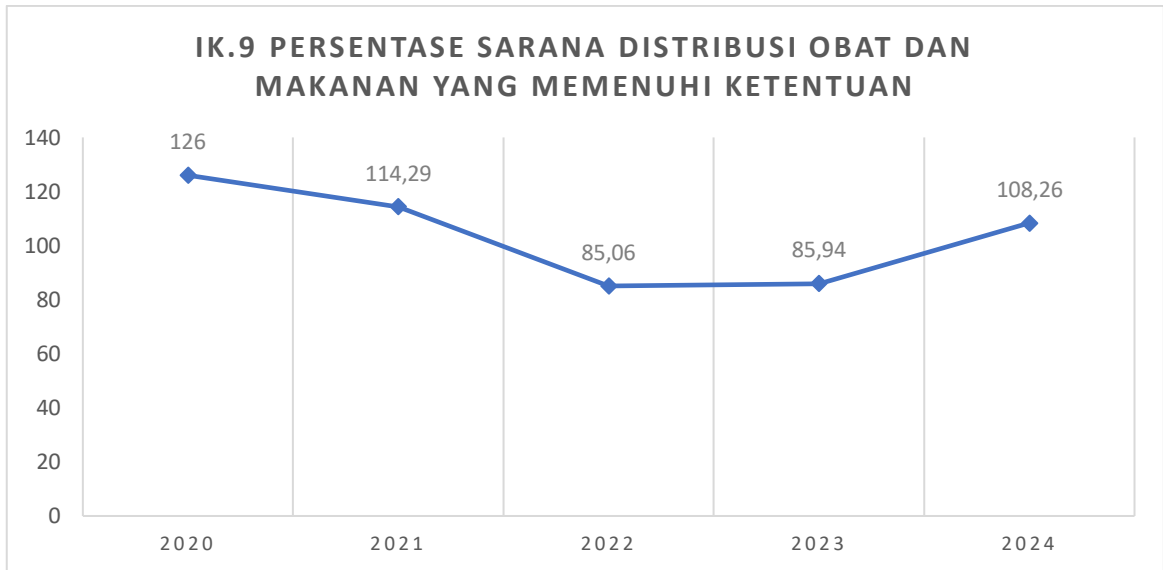
Tren kinerja penyelesaian keputusan penilaian sertifikasi tepat waktu menunjukkan pola siklus naik-turun selama periode 2020 hingga 2024. Kinerja dimulai dengan baik di atas 100% pada tahun 2020 (102,94%) dan mencapai puncaknya di tahun 2021 (113,64%), yang menunjukkan adanya penanganan kasus yang melebihi target waktu. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, di mana persentase penyelesaian tepat waktu jatuh di bawah target (95,24%), mengindikasikan adanya kendala atau penundaan dalam proses sertifikasi. Kinerja berhasil dipulihkan kembali ke atas target pada tahun 2023 (106,38%), sebelum akhirnya turun tipis dan stabil tepat pada target 100% di tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja menunjukkan bahwa organisasi sebagian besar berhasil menyelesaikan keputusan sertifikasi tepat waktu atau lebih cepat, kecuali pada tahun 2022.

IK.8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



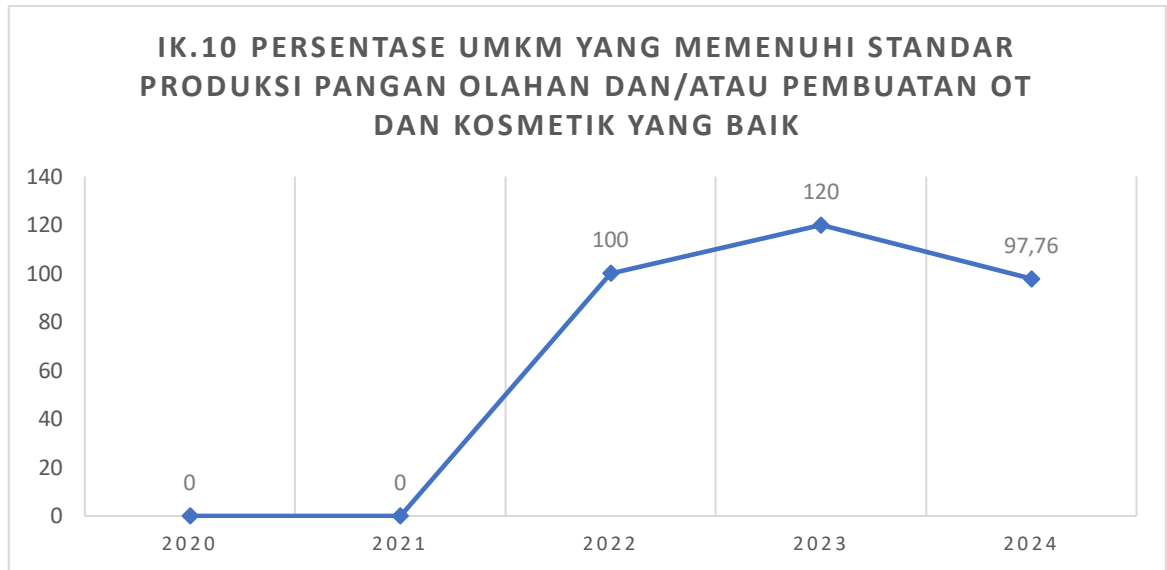
Tren kinerja kepatuhan sarana produksi obat dan makanan terhadap ketentuan menunjukkan kontras tajam antara periode awal dan akhir. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase sarana yang memenuhi ketentuan berada di tingkat yang sangat tinggi (129,79% dan 133,34%), mengindikasikan bahwa kepatuhan sangat kuat, bahkan mungkin termasuk sarana yang melebihi standar atau peningkatan kepatuhan yang signifikan. Namun, kinerja tersebut mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 79,05%, dan terus stagnan di bawah target pada tahun 2023 (77,39%). Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2024 (87,18%), kinerja ini masih jauh di bawah target 100% dan level kepatuhan awal, menunjukkan adanya isu struktural atau perubahan signifikan yang menyebabkan sebagian besar sarana tidak lagi memenuhi ketentuan di tahun-tahun terakhir.

IK.9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Tren kinerja kepatuhan sarana distribusi obat dan makanan menunjukkan pola penurunan tajam diikuti dengan stagnasi dan pemulihan. Pada tahun 2020 hingga 2021, persentase kepatuhan berada di atas target 100% (126% dan 114,29%), yang menandakan tingkat kepatuhan yang sangat baik di awal periode. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, jatuh di bawah target menjadi 85,06%, dan stagnan pada tingkat yang hampir sama di tahun 2023 (85,94%), menunjukkan adanya masalah kepatuhan yang konsisten selama dua tahun tersebut. Kinerja kemudian menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2024, melonjak kembali di atas target ke angka 108,26%. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan kepatuhan yang mengkhawatirkan pada periode 2022-2023, upaya perbaikan di tahun 2024 berhasil mengembalikan persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan ke tingkat yang memuaskan.

IK.10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Tren kinerja kepatuhan UMKM menunjukkan bahwa program ini baru mulai aktif di tahun 2022, ditandai dengan angka 0% pada tahun 2020 dan 2021. Setelah diluncurkan pada tahun 2022, kinerja langsung mencapai target 100%, menunjukkan keberhasilan awal program dalam menjangkau dan mendorong kepatuhan UMKM. Kinerja mencapai puncak tertinggi di tahun 2023 dengan persentase 120%, yang mengindikasikan adanya pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan minor menjadi 97,76%. Meskipun sedikit di bawah target 100%, kinerja secara keseluruhan dari 2022 hingga 2024 menunjukkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan program ini, terutama mengingat tantangan dalam mendorong kepatuhan di sektor UMKM.

IK.11 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten

Pada indikator kinerja Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten baru muncul di tahun 2024, maka tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 senilai 105.26% dalam kriteria sangat baik.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Makanan aman, diperlukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). sehingga sasaran kegiatan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat dan makanan dapat tercapai, diperlukan juga adanya pemahaman mendalam tentang aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sasaran ini ditujukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan dan penggunaan obat dan makanan. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja yaitu Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yaitu tingkat efektifitas KIE obat dan makanan.

IK.12 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



Tren tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan pola kinerja yang berfluktuasi namun umumnya berada di sekitar target 100%. Kinerja dimulai sedikit di bawah target pada tahun 2020 (97,99%), namun segera membaik dan stabil di atas target pada tahun 2021 (100,87%) dan 2022 (100,91%). Efektivitas mencapai puncak tertinggi di tahun 2023 dengan angka 103,82%, menunjukkan

keberhasilan yang optimal dalam menjangkau dan memberikan dampak melalui program KIE. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024, di mana efektivitas turun di bawah target menjadi 98,37%. Secara keseluruhan, kinerja KIE cenderung efektif selama sebagian besar periode yang diamati, tetapi penurunan di tahun 2024 memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengurangi dampak program KIE tersebut.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) Meningkatkan building network dan maintain secara berkelanjutan dengan lintas sektor (Pentaheliks), terkait dukungan program-program KIE; b) menggerakkan komunitas untuk bisa memperluas/amplifikasi pesan KIE; c) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; d) review terhadap standar pelayanan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; e) memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi; f) Pelatihan khusus bagi petugas KIE untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif; g) Penyediaan media edukasi digital yang interaktif dan berbasis teknologi; h) Meningkatkan keterjangkauan informasi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, aplikasi mobile, dan website resmi, dan i) Penyediaan konten edukasi yang adaptif terhadap kelompok usia, latar belakang, dan kebutuhan khusus masyarakat.

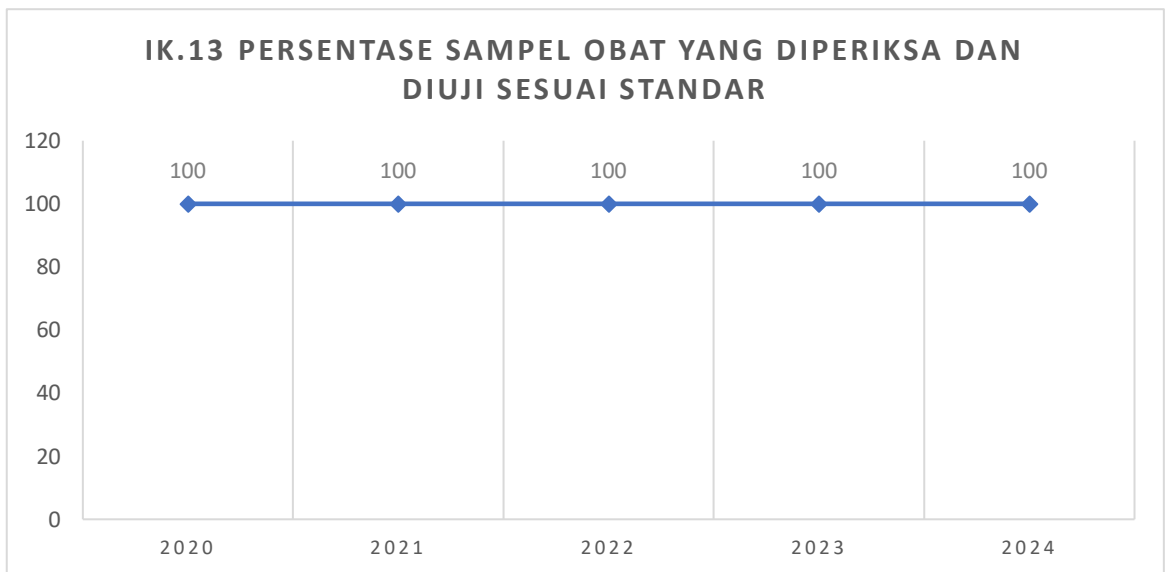
4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

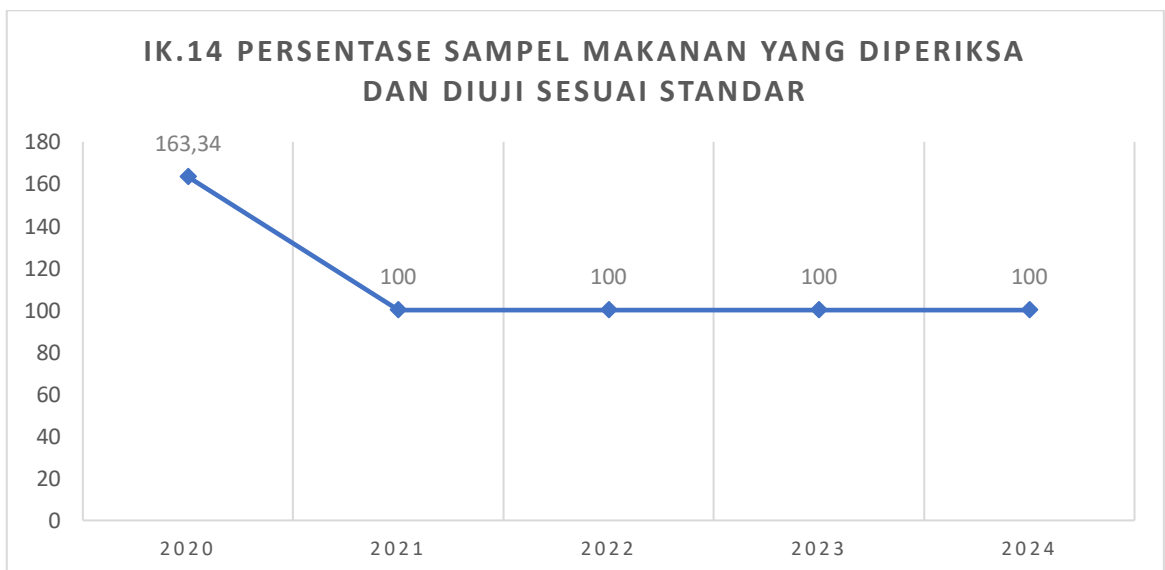
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan merupakan salah satu tujuan strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan Obat dan Makanan ini juga merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan UPT dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan. Dengan penjaminan

keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Balikpapan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan produk Obat dan Makanan, serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan efektif untuk dikonsumsi serta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Kabupaten Balikpapan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

IK.13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



IK.14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator adalah Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator :

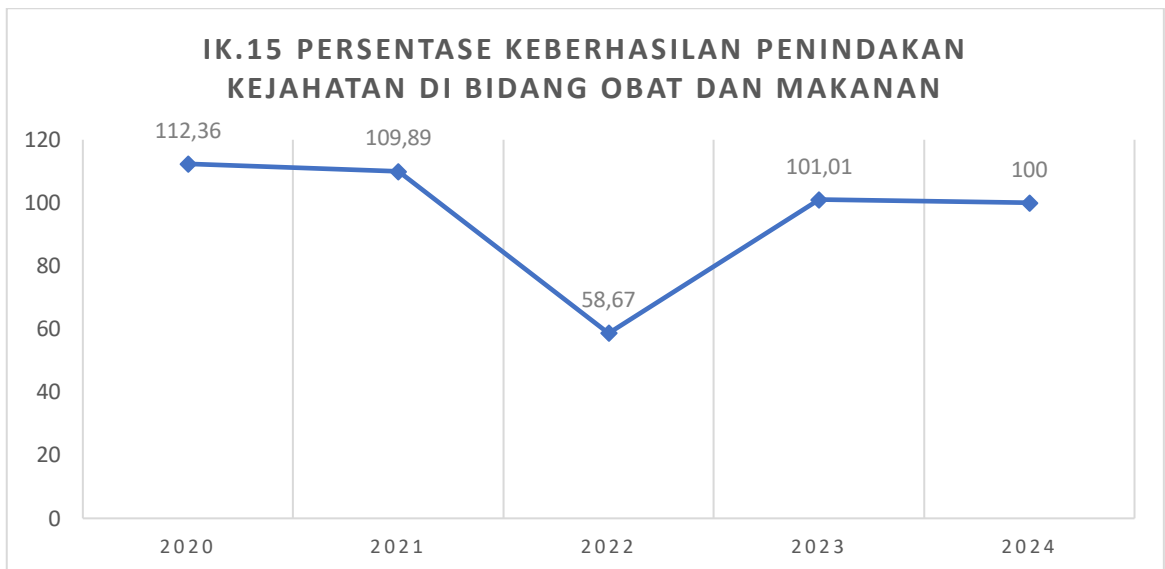
- a. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
- b. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

IK.15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



Tren persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan menunjukkan pola penurunan drastis diikuti dengan pemulihan penuh. Kinerja awalnya sangat baik, berada di atas target 100% pada tahun 2020 (112,36%) dan 2021 (109,89%), mengindikasikan efektivitas penindakan yang melampaui sasaran. Namun, terjadi penurunan tajam dan mengkhawatirkan di tahun 2022, di mana persentase keberhasilan anjlok menjadi 58,67%, menunjukkan adanya hambatan serius dalam proses penindakan pada tahun tersebut. Kinerja berhasil dipulihkan secara signifikan pada tahun 2023, kembali mencapai angka di atas target (101,01%), dan kemudian stabil tepat pada target 100% di tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terjadi kegagalan besar di tahun 2022, unit penindakan menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi dan sesuai target dalam dua tahun terakhir.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru antara lain penjualan obat dan makanan ilegal secara online melalui marketplace dan media sosial, peredaran obat psikotropika ilegal dan obat keras OOT yang menyerupai peredaran narkoba yaitu paket obat psikotropika dan obat OOT ditanam atau diletakkan di suatu tempat tertentu, baru kemudian pembeli diberikan info lokasi atau share location melalui whatsapp, sehingga transaksi peredaran obat psikotropika ilegal dan obat OOT tersebut tidak mudah dilacak oleh petugas. Hal tersebut perlu diatasi dan

diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu perkuatan koordinasi lintas sektor CJS (Criminal Justice System) dengan berbagai kegiatan, seperti Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan dengan CJS antara lain Korwas PPNS di Satreskrim Polres Setempat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, BNN Kabupaten, Dinas Kesehatan. Selain pertemuan koordinasi dengan lintas sektor CJS, juga perlu dilaksanakan Pertemuan Peningkatan Kompetensi PPNS Balai POM di Balikpapan.

6. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM melalui Balai POM di Balikpapan berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. SK2 merupakan sasaran kegiatan yang dilakukan hanya tahun 2024 dengan capaian kinerja 104,11%. SK6 diukur dengan 1 indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT.

Dengan capaian kinerja tahun 2024, namun upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

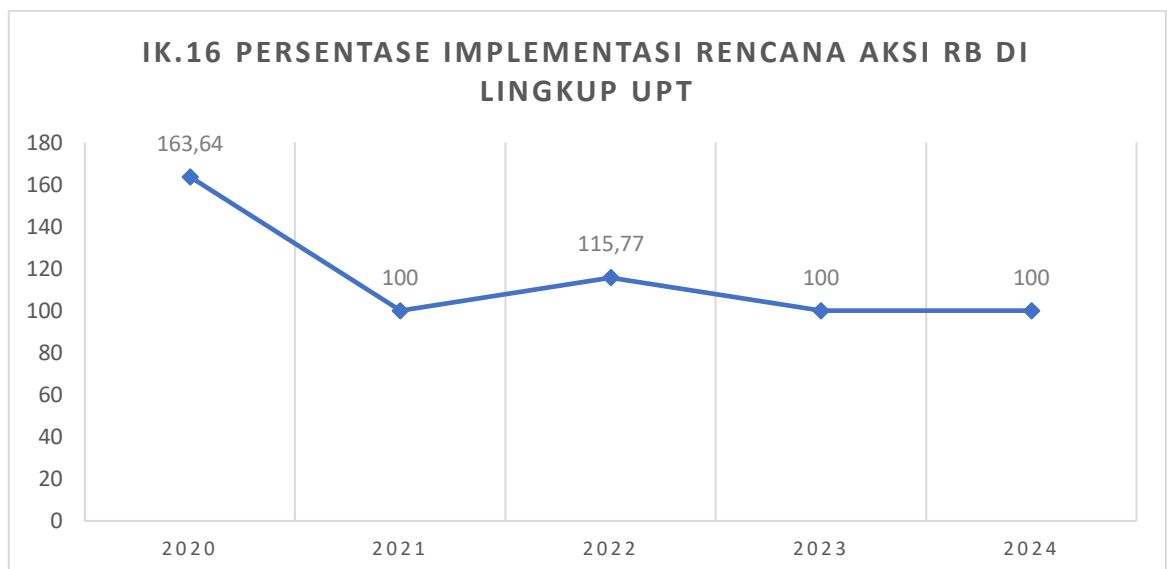
- a. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM;
- b. Memberikan pendampingan terhadap UMKM secara intensif, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha yang menjadi target pendampingan;
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai Balai POM di Balikpapan agar dapat melayani pelaku usaha dan masyarakat dengan optimal.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Terwujudnya Tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

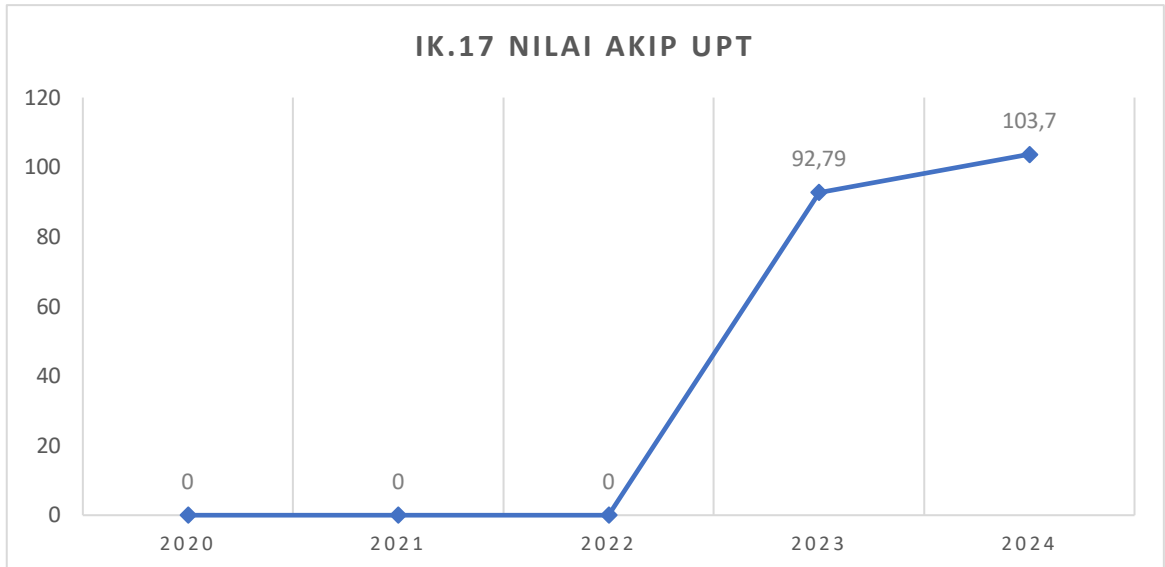
IK.16 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT



Tren implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT menunjukkan adanya stabilisasi kinerja pada target 100% setelah periode awal yang tinggi. Kinerja dimulai dengan angka yang sangat tinggi pada tahun 2020 (163,64%), yang mengindikasikan implementasi yang melampaui ekspektasi atau penyelesaian aksi tahun sebelumnya. Angka tersebut kemudian turun dan stabil tepat pada target 100% di tahun 2021. Meskipun terjadi sedikit kenaikan di tahun 2022 (115,77%), tren ini kembali stabil pada target 100% di tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan konsistensi dan kepatuhan yang kuat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di mana unit pelaksana teknis secara

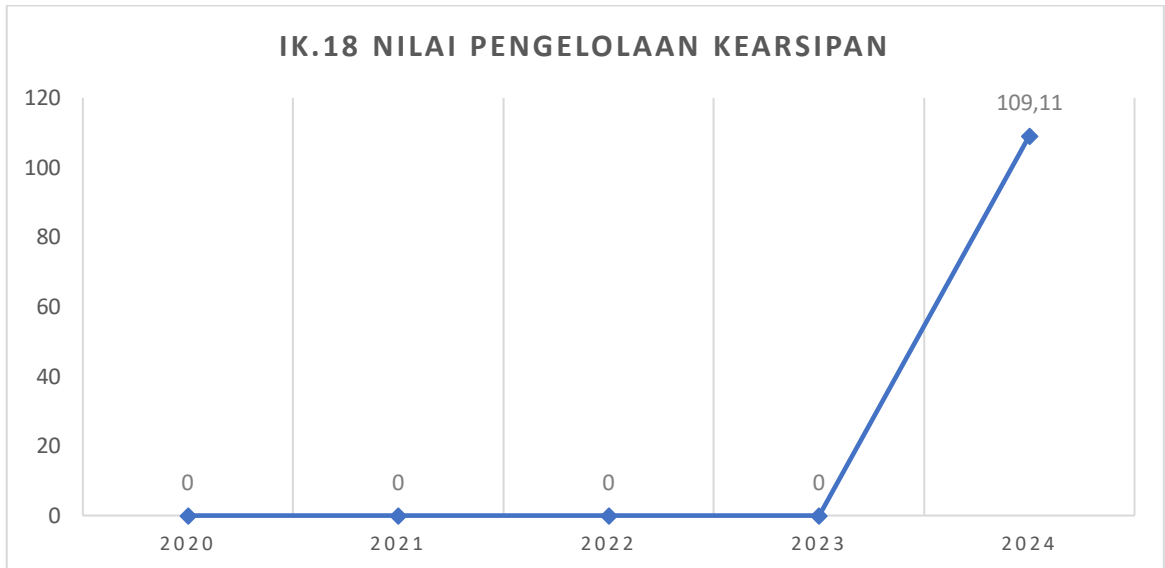
efektif dan stabil mampu mencapai sasaran implementasi rencana aksi dalam empat tahun terakhir.

IK.17 Nilai AKIP UPT



Tren Nilai AKIP UPT menunjukkan bahwa pengukuran dan pelaporan AKIP pada tingkat UPT baru dimulai secara efektif di tahun 2023, ditandai dengan nilai nol pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Setelah program penilaian diimplementasikan, kinerja langsung mencapai tingkat yang sangat baik pada tahun 2023 dengan nilai 92,79. Kinerja ini kemudian meningkat lebih lanjut pada tahun 2024, berhasil melampaui target (diasumsikan target 100) dan mencapai nilai 103,7. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam membangun dan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat unit pelaksana teknis dalam periode waktu yang singkat, mencapai level di atas target hanya dalam dua tahun pertama pelaksanaannya.

IK.18 Nilai Pengelolaan Kearsipan



Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan menunjukkan bahwa pengukuran baru dimulai secara efektif di tahun 2024, ditandai dengan nilai nol pada tahun 2020-2023. Setelah program penilaian diimplementasikan, kinerja langsung mencapai tingkat yang sangat baik pada tahun 2024 dengan nilai 109,11.

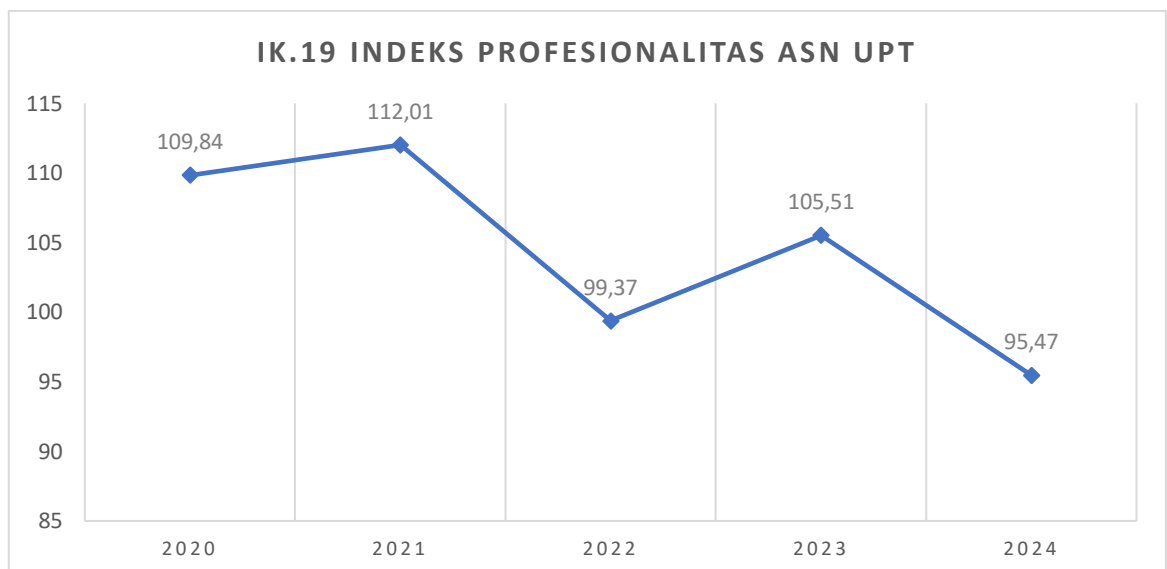
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM. SK8 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 98,04% di tahun 2022; 106,64% di tahun 2023; dan 96,45% di tahun 2024.

IK.19 Indeks Profesionalitas ASN UPT



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

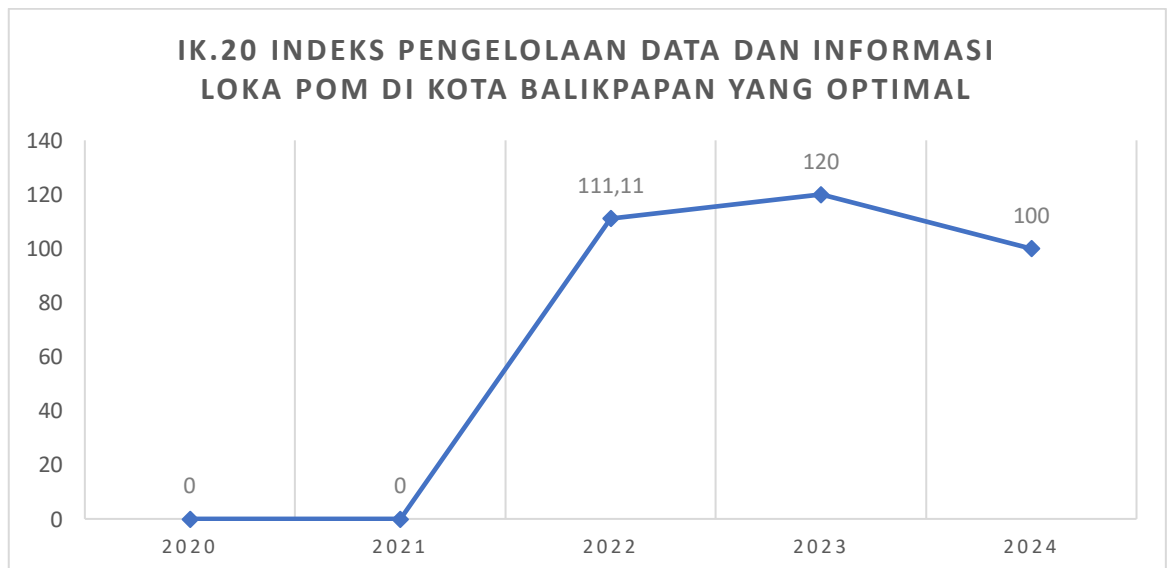
- Mengimplementasikan sistem untuk memonitoring capaian pegawai;
- Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan GAP Kompetensi;
- mengikuti pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Dalam mencapai tujuan ini, Balai POM di Balikpapan berupaya meningkatkan kapasitas laboratoriumnya untuk melakukan pengujian dan analisis obat dan produk terkait. Penguatan laboratorium Balai POM di Balikpapan dilakukan untuk menjamin proses pengawasan Obat dan Makanan dari sisi pengujian Obat dan Makanan dapat berjalan sesuai dengan standar uji yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Dengan penguatan laboratorium serta sistem data yang lebih andal, efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan dapat ditingkatkan, sehingga keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat semakin terjamin. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024), dengan target sebesar 3 di tahun 2024. SK9 memiliki tren naik turun capaian kinerja yaitu 111,11% di tahun 2022; 120% di tahun 2023; dan 100% di tahun 2024.

IK.20 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Balikpapan yang Optimal



Aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional

teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

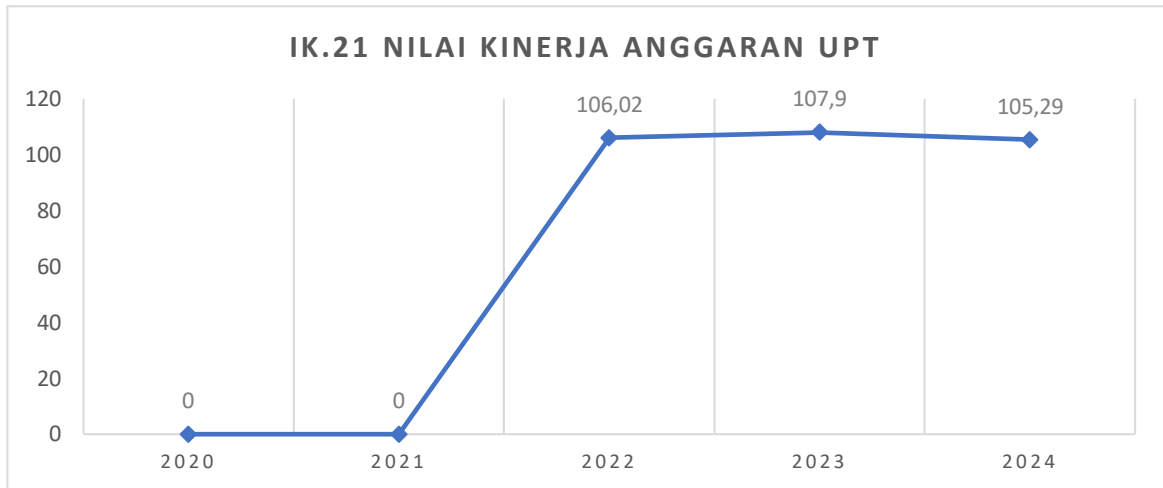
Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator adalah Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar, dan Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Balikpapan yang optimal. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

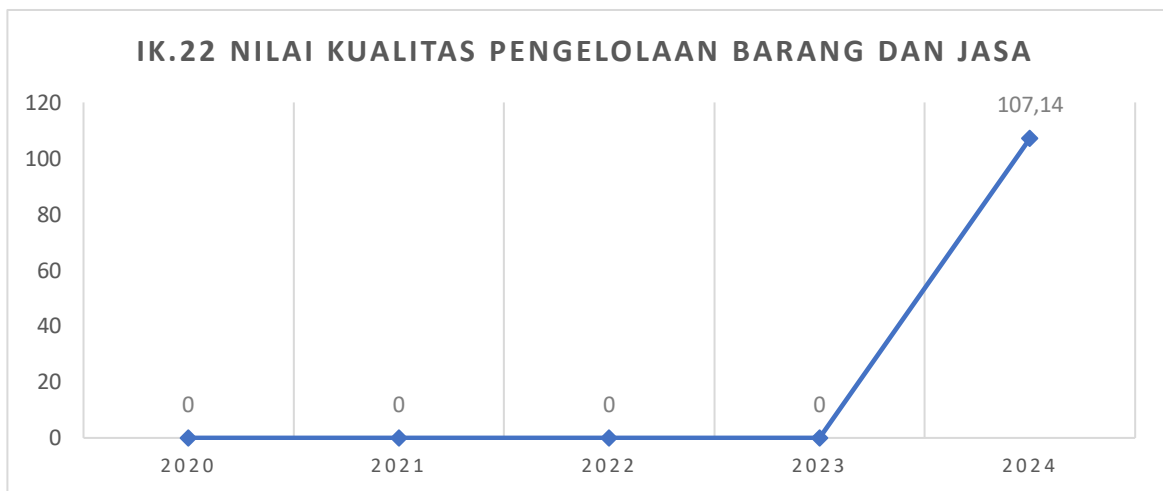
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai pengelolaan barang milik negara, dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. SK10 memiliki tren naik capaian kinerja yaitu 106,02% di tahun 2022; 107,90% di tahun 2023; dan 105,29% di tahun 2024.

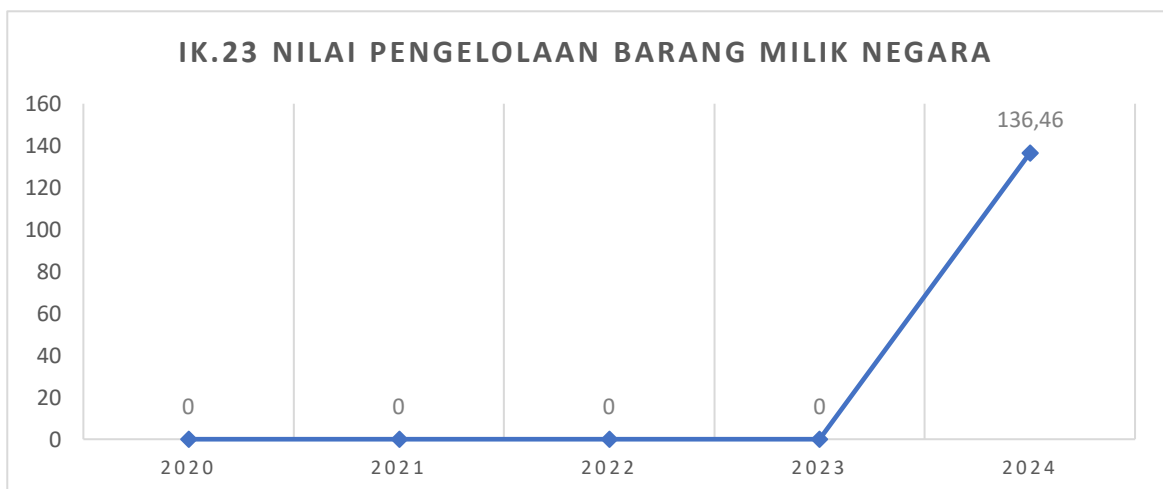
IK.21 Nilai Kinerja Anggaran UPT



IK.22 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa



IK.22 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara



IK.21 Nilai Kinerja Anggaran UPT

IK.24 Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri



Ketiga indikator kinerja yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset (IK.24, IK.22, dan IK.23) adalah inidikator baru pada tahun 2024,menunjukkan pola yang identik, yaitu tidak adanya pengukuran atau pelaporan pada periode 2020 hingga 2023, yang ditunjukkan oleh nilai nol. Pada tahun 2024 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (IK.24) mencapai realisasi hingga 150,17%, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (IK.22) mencapai 107,14, dan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (IK.23) mencapai 136,46. Pencapaian di atas 100% secara konsisten pada tahun pertama pelaporan ini mengindikasikan peluncuran sistem pengukuran yang sangat sukses yang didukung oleh kinerja pengelolaan keuangan dan aset yang sangat efektif dan melampaui target di tahun 2024.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk kesepuluh kalinya sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

- penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited;
- pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI;
- tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu;
- meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran;
- pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat

1.1.2 Aspirasi Masyarakat/Stakeholder

Balai POM di Balikpapan memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari tantangan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru dan dinamika sosial ekonomi, oleh karena itu aspirasi masyarakat menjadi penting untuk membantu Balai POM di Balikpapan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat serta merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Aspirasi Masyarakat dapat membantu Balai POM di Balikpapan dalam memahami perubahan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi dan perubahan demografis terhadap pola konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Balikpapan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif untuk memberikan aspirasi dalam menyusun Renstra BPOM 2025-2029, sehingga Balai POM di Balikpapan dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu menjangkau aspirasi masyarakat, Balai POM di Balikpapan melaksanakan Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Balai POM di Balikpapan Tahun 2024. survei dilakukan langsung kepada responden masyarakat Balikpapan. Berdasarkan hasil survei tersebut frasa yang sering muncul antara lain “Kinerja Balai POM di Balikpapan”, “Pengawasan Produk” dan “Sosialisasi Balai POM di Balikpapan Ke masyarakat”. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklasterkan dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar Balai POM di Balikpapan pengawasan secara seluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan. Aspirasi dan masukan masyarakat yang diberikan berdasarkan survei pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun 2024, yaitu:

- 1) **Penyebaran Informasi yang Masif** Kebutuhan masyarakat terkait informasi dan edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan lebih luas lagi dan menjangkau sebagian besar masyarakat di wilayah

pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melalui kegiatan sosialisasi sampai di tingkat desa/kelurahan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 2) **Peningkatan Sarana Prasarana** Masyarakat menginginkan peningkatan fasilitas untuk mendukung layanan yang lebih optimal, sejalan dengan kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Salah satunya tersedianya Laboratorium Pengujian yang berstandar.
- 3) **Kerja Sama dengan Stakeholder** Masyarakat memberikan saran untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat pusat maupun daerah dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan memiliki 3 wilayah pengawasan yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kota Balikpapan merupakan daerah yang sangat strategis sebagai salah satu pusat perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi salah pintu gerbang menuju ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Penunjukkan Kalimantan Timur khususnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan wilayah pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dan Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser sebagai wilayah daerah/kota penyangga IKN. Hal tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian dan perdagangan termasuk didalamnya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang meningkat. Potensi peningkatan dalam bidang sediaan farmasi dan pangan olahan ialah dengan pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan distribusi perdagangan dan konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk peningkatan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lebih bervariasi menjadi suatu tantangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dalam melaksanakan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang,

kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan RPJMN 2024-2029. Identifikasi tersebut meliputi penentuan tantangan dan peluang Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan menggunakan analisis SWOT yang dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan periode 2025-2029. Analisis SWOT memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Analisis SWOT ini dilakukan untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu. Hasil Analisis terhadap Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) eksternal dan internal dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dirangkum dalam gambar berikut:

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Balikpapan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini dapat mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat organisasi Balai POM di Balikpapan. Berikut ini kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Balikpapan, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

A. Integritas Pimpinan dan Pegawai

Integritas yang ditunjukkan oleh pimpinan dan pegawai merupakan kekuatan yang kuat dalam membangun fondasi untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang. Integritas pimpinan telah diperlihatkan melalui komitmen yang kuat dan visioner terhadap visi dan misi organisasi. Integritas pimpinan tersebut dibuktikan dengan adanya maklumat pelayanan publik oleh Kepala Balai POM di Balikpapan, berkomitmen dalam sistem Manajemen Mutu dengan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2024.

Integritas pimpinan juga dibuktikan dengan menjadi teladan dalam menunjukkan penolakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, terutama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang rentan terjadi mengingat besarnya potensi ekonomi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang diikuti oleh semua Pegawai.

B. Kelembagaan yang diperkuat

Peningkatan status dari Loka POM di Kota Balikpapan menjadi Balai POM di Balikpapan secara otomatis memperluas dan memperjelas cakupan wilayah pengawasan. Balai POM di Balikpapan kini menjadi garda terdepan pengawasan di wilayah strategis, termasuk Balikpapan, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, bahkan memiliki peran krusial dalam pengawalan keamanan Obat dan Makanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkuatan kelembagaan ini diperkuat dengan penambahan sumber daya manusia berupa Calon Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2025 dengan rincian 5 (lima) pegawai di bagian fungsional Tata Usaha dan 1 (satu) di bagian fungsional teknis pemeriksaan sehingga Jumlah Pegawai saat ini terdiri dari 17 Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Balai POM di Balikpapan memiliki Calon Aparatur Negeri Sipil (CASN) sebanyak 6 orang pegawai. Selain itu dalam upaya menunjang kegiatan pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan dilakukan mekanisme pengadaan jasa outsourcing melalui e-catalog sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 orang staf administrasi, 1 orang tenaga pengemudi, 3 orang petugas keamanan, dan 1 orang petugas kebersihan. Hal ini memungkinkan Balai POM di Balikpapan melaksanakan fungsi yang lebih komprehensif karena telah mengurangi beban pekerjaan di Tata Usaha yang sebelumnya sebagian dikerjakan oleh fungsional teknis.

C. Pengakuan dari Lembaga Sertifikat Akreditasi

Balai POM di Balikpapan telah telah meraih kembali sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutunya. Sertifikasi ini

dipertahankan setelah audit re-sertifikasi yang dilakukan pada September 2024. Hal tersebut menunjukkan komitmen Balai POM di Balikpapan akan tetap mempertahankan komitmen dalam manajemen Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara komprehensif, transparansi dan akuntabel.

- D. *Networking* yang kuat dengan stakeholder di wilayah pengawasan
- Balai POM di Balikpapan telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan, lembaga pendidikan dan penelitian serta Aparat Penegak hukum yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kerja sama tersebut memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan juga memperkuat kapasitas Balai POM di Balikpapan dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat. Kerja sama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Balikpapan diantaranya Kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dibuktikan dengan SK Walikota Balikpapan NomorNo. 188.45-331/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Telah terbit Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Balikpapan tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan Serta Mutu Sediaan farmasi dan pangan olahan di Kota Balikpapan No. KS.01.02.30B.20B4.08.23.03 dan No 001/17.06/SK.BBPOM/VIII/2023, Telah terbit Nota Kesepakatan No 197/08/II/2025 Tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Mal Pelayanan Kota Balikpapan, Telah terbit Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Politeknik Nusantara Balikpapan tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan obat dan makanan No. KS.01.02.30B.30B4.11.23.04 No

338/PN26/ MOU/XI/2023, Telah terbit Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Universitas Mulia tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan obat dan makanan No. KS.01.02.30B.30B4.12.23.05 No 044/MoU/ DEK-FHK/UM/X/2023, Telah terbit Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Institut Teknologi Kalimantan tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan No. KS.01.01.23C.09.24.07 No 311/IT10/HM.02/2025, dan Terbentuknya tim Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kota Balikpapan berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-302/2025.

E. Pedoman Pengawasan yang Jelas

Dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan pegawai Balai POM di Balikpapan telah dibekali dengan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi dalam menunjang kegiatan pengawasan. Selain itu terdapat petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM dan menjadi pedoman pegawai Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Petunjuk pelaksana/Petunjuk teknis yang telah digunakan sebagai pedoman Pegawai Balai POM di Balikpapan dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya Pedoman sampling sediaan farmasi dan pangan olahan yang diperbarui berkala, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, petunjuk teknis pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, petunjuk teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik, petunjuk teknis operasi siber sediaan farmasi dan pangan olahan, dan petunjuk teknis intelijen sediaan farmasi dan pangan olahan.

F. Komitmen Pimpinan dan Pegawai di Balai POM di Balikpapan dalam Penerapan Reformasi Birokrasi

Komitmen pimpinan dan pegawai dalam penerapan Reformasi Birokrasi dituangkan dalam adanya Pembentukan Tim Zona Integritas

di lingkungan Balai POM di Balikpapan dan disertai komitmen mewujudkan wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan oleh seluruh pegawai dan komitmen mewujudkan wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Balai POM di Balikpapan mendapatkan nilai evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) sebesar 72,11. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,42 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,69 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

G. Sebagian Besar Pegawai di Balai POM di Balikpapan berada pada usia yang produktif (generasi muda)

Sebagian besar pegawai didominasi oleh pegawai dengan usia yang produktif yang mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini dengan baik. Hal tersebut membuat Balai POM di Balikpapan lebih proaktif dan responsif dalam memperbarui pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Pegawai yang berada di usia ≤ 24 Tahun berjumlah 2 Pegawai, usia 25-29 Tahun berjumlah 9 Pegawai, usia 30-34 Tahun 14 Pegawai, dan usia 35-40 Tahun berjumlah 5 Pegawai dan Pegawai yang berada di usia ≥ 41 Tahun sejumlah 1 pegawai. Berdasarkan Generasi Pegawai Balai POM di Balikpapan didominasi oleh Generasi Y/Generasi milenial dengan jumlah 23 Pegawai, Gen Z sejumlah 7 pegawai dan Gen X sejumlah 1 Pegawai.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus meningkat. Balai POM di Balikpapan tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Balikpapan. Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk memperkuat kinerja Balai POM di Balikpapan dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut area Balai POM di Balikpapan yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

A. *Database* belum terintegrasi dan dukungan IT masih belum memadai. Balai POM di Balikpapan belum memiliki server khusus yang menyimpan dan mengintegrasikan data kinerja pegawai di masing *device* sehingga penyimpanan data belum optimal dan memiliki risiko data yang hilang, akan tetapi Badan POM telah menyediakan ruang penyimpanan *database online* berupa Simpan POM untuk mengatasi kekurangan dukungan IT dan *database* di Unit Pelaksana Teknis Badan POM. Balai POM mengintegrasikan data antar pegawai dan tim kerja dengan aplikasi pihak luar seperti *Google Site* dan *Google Drive*.

B. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk dukungan operasional yang sangat penting dalam menunjang Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam pelaksanaannya Balai POM di Balikpapan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi dalam kinerja. Salah satunya Laboratorium yang hanya dapat melaksanakan pengujian yang terbatas. Sehingga sampel pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebagian besar diujikan pada laboratorium regional yang memiliki fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. Balai POM di Balikpapan juga belum memiliki gedung dengan kepemilikan sendiri. Gedung/bangunan yang

sekarang digunakan sebagai Kantor Balai POM di Balikpapan merupakan pinjam pakai gedung kantor milik Pemerintah Kota Balikpapan. Gedung/bangunan kantor yang bukan milik sendiri membatasi kewenangan Balai POM di Balikpapan untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti sarana pelayanan publik, gudang barang bukti, ruang arsip.

C. Sumber Daya Manusia belum memadai.

Peningkatan status dari Loka POM di Kota Balikpapan menjadi Balai POM di Balikpapan membuat bertambahnya tanggung jawab dan tuntutan kinerja yang lebih meningkat, tetapi sumber daya manusia masih belum bertambah secara signifikan menyesuaikan beban kerja status Balai POM sehingga perlu penambahan pegawai secara jumlah maupun kompetensi dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah tersedia. Berdasarkan dari Analisis Beban Kerja (ABK) yang tercantum pada aplikasi SIRENSDM, persentase nilai pemenuhan ABK sebesar 63,89%. Hal tersebut menandakan adanya GAP jumlah ABK ASN ideal yaitu 36 pegawai dengan realitas jumlah pegawai ASN yang tersedia yaitu 23 Pegawai.

D. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk

Keterlambatan regulasi dalam merespon variasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan adalah tantangan dinamis yang memerlukan respons kebijakan yang responsif dan berbasis risiko. Produk-produk baru yang belum memiliki standar pengawasan yang jelas rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Balai POM di Balikpapan kesulitan melakukan pengawasan *post-market* yang efektif karena tidak memiliki referensi kriteria *non-compliance* (tidak memenuhi ketentuan) yang spesifik Kegagalan untuk mengatasi kelemahan ini dapat mengikis kredibilitas pengawasan dan membahayakan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah laju inovasi global.

E. Payung Hukum Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan masih lemah

Belum adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diharapkan dapat meningkatkan sanksi pidana dan denda secara signifikan agar sebanding dengan potensi keuntungan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Jika sanksi yang berlaku saat ini dinilai lemah, maka efek jera bagi pelaku kejahatan skala besar menjadi rendah. kewenangan PPNS BPOM dalam kasus-kasus kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan seringkali masih diinterpretasikan secara terbatas, mengurangi kecepatan dan ketegasan penindakan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*Opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat menjadikan Balai POM di Balikpapan menjadi satuan kerja yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adaptif dengan perkembangan zaman. Berikut peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Balikpapan:

A. Dukungan Stakeholder dalam Sinergitas Pengawasan

Dukungan stakeholder wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan sebagian besar telah membantu dalam proses pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar baik secara *pre market* maupun *post market*. Dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dan Perjanjian Kerja Sama bersama dengan *stakeholder* terkait sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Balikpapan No. 188.45-331/2019.
2. Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Politeknik Nusantara Balikpapan tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan No. KS.01.02.30B.30B4.11.23.04 No 338/PN26/ MOU/XI/2023.

3. Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Universitas Mulia tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan No. KS.01.02.30B.30B4.12.23.05 No 044/MoU/ DEK-FHK/UM/X/2023
4. Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dan Institut Teknologi Kalimantan tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan No. KS.01.01.23C.09.24.07 No 311/IT10/HM.02/2025.
5. Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-302/2025.

Dengan adanya Surat Keputusan dan Perjanjian Kerja Sama yang telah terbit di Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Kabupaten/Kota lain yang berada di lingkup pengawasan Balai POM di Balikpapan.

B. Wilayah Pengawasan Balai POM di Balikpapan merupakan daerah Strategis yang menjadi Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)

Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang mengawasi daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang Bagi Balai POM di Balikpapan dalam berbagai hal seperti Peningkatan alokasi sumber daya dan akses prioritas terhadap kebijakan, program, dan dukungan teknis dari BPOM Pusat, kementerian terkait dan *stakeholder* IKN lainnya serta bila kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan terhadap kinerja dan integritas Badan POM. Adanya pertumbuhan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan khususnya di sekitar wilayah IKN.

C. Perkembangan Jumlah UMKM

Peluang dari peningkatan jumlah UMKM yang berkembang pesat Balai POM di Balikpapan menjadi lembaga pembina dan fasilitator mutu yang berperan besar dalam memajukan perekonomian dan menjadi filter pertama pada peredaran sediaan farmasi dan pangan

olahan dan mempunyai peran krusial dalam mendukung ekosistem IKN yang aman dan berdaya saing sediaan farmasi dan pangan olahan. Pada Tahun 2024 berdasarkan layanan ULPK jumlah konsumen yang bertanya terkait proses pendaftaran produk sebanyak 63% dan 9% merupakan layanan sertifikasi. Pada Tahun 2025 terdapat peningkatan Layanan sertifikasi menjadi 25%. Hal tersebut menggambarkan antusiasme UMKM yang ingin mengajukan Nomor Izin Edar produknya. Kenaikan tersebut dimungkinkan terjadi mengalami peningkatan di Tahun berikutnya.

D. Percepatan Pelayanan Publik dan Kemudahan dalam Berusaha

Peluang bagi Balai POM di Balikpapan untuk memanfaatkan kekuatan kelembagaan dan integritas yang dimiliki. Dengan mengadopsi prinsip pelayanan prima, Balai POM di Balikpapan dapat mendukung pertumbuhan industri yang patuh dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk perlindungan masyarakat. Dengan adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat melalui Media Sosial, Subsite Balai POM di Balikpapan dan media elektronik lainnya serta beberapa inovasi pelayanan publik seperti JEMPOLAN (Jemput Bola Balai POM di Balikpapan), ISHOMAN (Isu Hangat Obat dan Makanan) SALOME OMA (Santai Ngobrol Rame-rame Tentang Obat dan Makanan), MOBILKU CEPAT (Mobil Laboratorium Keliling Uji Cepat Pangan dan Kosmetik).

E. Meningkatnya *Awareness* Masyarakat dan Lintas Sektor terhadap Isu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Peningkatan *awareness* masyarakat menjadi peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan masyarakat. Edukasi merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan konsumsi pangan dan sediaan farmasi yang tidak aman. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran akan mempercepat Balai POM di Balikpapan untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan olahan dan sediaan farmasi. Hal tersebut dapat meningkatkan citra dan legitimasi Balai POM di

Balikpapan sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya. Berdasarkan Data layanan ULPK terjadi peningkatan jumlah konsumen yang meminta layanan ULPK ke Balai POM di Balikpapan dari 82 konsumen di Tahun 2024 menjadi 85 konsumen di November Tahun 2025. Hal tersebut dimungkinkan tahun berikutnya akan ada peningkatan jumlah konsumen yang meminta layanan ULPK dengan berkembangnya teknologi dan *awareness* masyarakat terkait sediaan farmasi dan pangan olahan yang meningkat.

F. Perkembangan Teknologi dan Akses Informasi

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai POM di Balikpapan untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Peluang Balai POM di Balikpapan dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dari segi pengawasan perkembangan teknologi dapat memberikan respons yang cepat terhadap masalah keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keandalan lembaga. Proses edukasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan juga dapat lebih menjangkau lebih luas. Hal tersebut dapat meningkatkan citra Balai POM di Balikpapan dan dikenal lebih luas. Berdasarkan Data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Jumlah pengguna internet di Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai 229,4 juta jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan penetrasi internet sebesar 80,60%. Proses transisi menuju digitalisasi juga terjadi dalam kelembagaan Balai POM di Balikpapan yang dibuktikan pelaporan kinerja yang telah dilakukan secara digital.

G. Kesempatan Pegawai mengembangkan kompetensi di luar bidang keilmuan

Pengembangan Kompetensi yang adaptif dan menyesuaikan perkembangan zaman akan membentuk sumber daya manusia yang inovatif dan dapat memberikan lebih kekuatan pendorong inovasi dan adaptabilitas organisasi untuk menghadapi tantangan dinamis di masa

depan. Oleh karena adanya kekurangan jenjang jabatan tertentu di Balai POM di Balikpapan sehingga diberikan penugasan kepada pegawai di luar tugas pokok dan fungsinya untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang dibutuhkan organisasi.

1.2.4 Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Balikpapan. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini. Sehingga Balai POM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen ancaman yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Balikpapan:

A. Persaingan Kualitas Produk Dalam Negeri dengan Produk Luar Negeri

Persaingan kualitas ini memaksa Balai POM Di Balikpapan untuk terus meningkatkan kapasitas teknis, kompetensi SDM, dan efektivitas sinergi penegakan hukum demi menjamin produk yang beredar di wilayah Pengawasan Balai POM di Balikpapan adalah produk yang aman dan bermutu. Balai POM di Balikpapan juga dapat membantu pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan lokal untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat memiliki daya saing terhadap produk luar negeri. Berdasarkan data temuan pengawasan Balai POM di Balikpapan terkait produk pangan olahan ilegal di Kota Balikpapan didominasi oleh pangan olahan dari luar negeri. Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Sarana distribusi pangan mengedarkan Pangan Olahan Tanpa Izin Edar yang berasal dari Negara Malaysia dan Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) sarana distribusi mengedarkan Pangan Olahan Tanpa Izin Edar yang berasal dari Negara Malaysia. Hal ini dikarenakan letak Balai POM di Balikpapan yang merupakan salah satu jalur distribusi Pangan Olahan Ilegal dari Malaysia yang didistribusikan secara ilegal melewati perbatasan Malaysia dan Kalimantan Utara. Hal tersebut dapat merugikan produk pangan olahan dalam negeri yang telah memiliki

Izin Edar sehingga perlu dilakukan strategi untuk mencegah masalah tersebut.

B. Jenis Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bervariasi

Meningkatnya variasi dan inovasi jenis sediaan farmasi dan pangan olahan memberikan tantangan bagi Balai POM di Balikpapan untuk meningkatkan pengawasan. Hal tersebut memaksa Balai POM di Balikpapan untuk adaptif dan meningkatkan kapasitas teknis agar mampu melaksanakan pengawasan dengan komprehensif.

C. Informasi *Hoax* tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersebar

Informasi yang tidak akurat mengharuskan Balai POM Balikpapan untuk bersikap proaktif, responsif, dan adaptif terhadap Informasi yang tidak akurat dan beredar di masyarakat melalui platform media sosial untuk mencegah timbulnya persepsi yang salah terhadap kinerja Balai POM di Balikpapan saat ini, sekaligus memperkuat komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik. Perkembangan teknologi dan jumlah pengguna internet sesuai data APJII Jumlah pengguna internet di Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai 229,4 juta jiwa, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan penetrasi internet sebesar 80,60%. Namun ketiadaan mekanisme penyaringan kebenaran informasi sehingga masyarakat berpotensi terpapar konten yang tidak akurat dan menyesatkan. Hal ini menjadi salah satu ancaman tersebarnya informasi *hoax* melalui sosial media yang dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga Balai POM di Balikpapan perlu menyiapkan strategi untuk menangkal isu tersebut. Salah satu yang telah dilakukan oleh Balai POM di Balikpapan membuat konten khusus yang mengupas tentang fakta tentang sediaan farmasi dan pangan olahan melalui platform media sosial dengan judul TGIF (Ternyata Guys Ini Fakta).

D. Perubahan Pola hidup Masyarakat dan Pola Konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perubahan pola konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi salah satu ancaman karena berpengaruh pada jenis dan jumlah produk yang bervariasi sehingga mendorong Balai POM di Balikpapan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan untuk adaptif mengikuti tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tetap relevan dan efektif dalam melindungi Kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

- E. Penjualan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal secara daring
- Ancaman Kejahatan penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan secara ilegal membawa tantangan besar bagi Balai POM di Balikpapan dalam upaya menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Hal ini menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan baik, maka risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat sering bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh sediaan farmasi dan pangan olahan di media sosial dan *e-commerce*. Balai POM di Balikpapan diharapkan dapat melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring. Berdasarkan hasil Operasi siber sediaan farmasi dan pangan olahan Tahun 2024 Balai POM di Balikpapan telah mengirimkan rekomendasi *takedown* sejumlah 1104 tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan telah ditindaklanjuti dengan penurunan konten sekitar 1065 tautan atau 96,47% tautan. Kondisi ini bila tidak ditangani dengan baik maka akan muncul terus menerus tautan penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal karena tren penjualan produk secara daring setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

F. Demografi dan Komposisi Penduduk

Perubahan demografi dan komposisi penduduk menjadi salah satu ancaman karena hal tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan mempengaruhi jenis dan jumlah sediaan farmasi dan pangan olahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi pengawasan Balai POM di Balikpapan tetap relevan dan efektif dalam melindungi Kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

G. Tingginya Ekspektasi terhadap kinerja dan pelayanan Badan POM

Tuntutan Kinerja yang tinggi oleh sebagian besar Masyarakat menjadi ancaman bagi Balai POM di Balikpapan apabila tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat diubah menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi, memastikan Balai POM di Balikpapan mampu beroperasi secara efektif dan kredibel di bawah sorotan nasional.



Gambar 1.3 Hasil Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Balikpapan sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal

Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan tentunya berpedoman juga pada Visi tersebut di atas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.2 Misi

Untuk mendukung pencapaian Visi pada poin 2.1, maka disusunlah Misi strategis BPOM 2025-2029. Adapun Misi yang disusun harus selaras dengan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, dengan penjelasan seperti gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden 2025 - 2029

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi

olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan Visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) Misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan

terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan

dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2025

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2.	Terwujudnya Masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan	Indeks penguatan daya saing dan kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7

	Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh Tujuan BPOM.

2.4 Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi

masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum

menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM

dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator
Balai POM di Balikpapan periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	<i>dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 3. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 4. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029, khususnya sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini sehingga dapat dilakukan mitigasi maupun tindak lanjut yang tepat untuk mengatasi setiap risiko. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kinerja BPOM di Balikpapan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB KP di wilayah pengawasan	a. Koordinasi dengan lintas sektor terkait b. Berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan berkelanjutan	• Fungsi pengawasan (a,b) • Fungsi pengujian (b)
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Koordinasi dengan laboratorium penguji dalam lingkup regional terkait teknis pengujian b. Pengajuan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	• Fungsi pengujian (a) • Fungsi tata usaha (b)
		Rendahnya kepatuhan serta respon pelaku usaha terhadap pemenuhan ketentuan/peraturan dalam rangka produksi dan distribusi/penyerahan Sediaan Farmasi dan	a. Advokasi dan koordinasi kepada lintas sektor b. Melakukan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha c. Pemberian sanksi sesuai	• Fungsi pemeriksaan (a,c) • Fungsi sertifikasi (b) • Fungsi infokom (d)

		Pangan Olahan	ketentuan serta melakukan monitoring dan evaluasinya d. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku	
2.	Meningkatnya efektivitas KIE	Pelaksanaan KIE belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas dan kelompok sasaran secara optimal	a. Melakukan pengelolaan KIE serta monitoring dan evaluasi sesuai pedoman b. Melakukan pendekatan berbeda terhadap KIE yang dilakukan c. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor	Fungsi infokom (a,b,c)
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Menurunnya semangat/konsistensi pelaku usaha dalam proses pengurusan izin maupun mempertahankan usahanya	a. Melakukan peningkatan kompetensi terhadap petugas evaluator b. Menyediakan wadah agar pelaku usaha dapat berkonsultasi secara mendalam dengan petugas	Fungsi sertifikasi (a,b)
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Meningkatnya kasus kejahatan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Koordinasi berkesinambungan dengan lintas sektor b. Edukasi masif	• Fungsi penindakan (a) • Fungsi infokom (b)

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		kepada masyarakat sehingga lebih sadar akan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilarang beredar	
		Terhambatnya proses penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Koordinasi berkesinambungan dengan lintas sektor b. Peningkatan kompetensi petugas dan pembentukan PPNS	Fungsi Penindakan (a,b)
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti	a. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional. b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Fungsi penindakan (a,b,c)
6.	Layanan Publik UPT yang prima	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan konsultasi yang kurang memadai	a. Pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang	a. Fungsi tata usaha (a) b. Fungsi infokom (b) c. Fungsi sertifikasi (b)

			dibutuhkan b. Menyediakan wadah konsultasi berbasis daring	
		Pelayanan yang diberikan tidak konsisten antar petugas	a. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan sesuai tupoksinya b. Memastikan bahwa pelayanan dilakukan sesuai standar pelayanan	Fungsi infokom (a,b)
7.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta pengelolaan anggaran	a. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja.	Fungsi tata usaha (a,b)
		Penurunan kinerja serta pengelolaan anggaran yang kurang efisien	a. Peningkatan kompetensi pegawai pengelola anggaran b. Melakukan pelaporan kinerja dan anggaran secara	Fungsi tata usaha (a,b)

			memadai sebagai bahan evaluasi	
--	--	--	--------------------------------------	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia telah menyusun Undang – Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Keberlanjutan. Dalam RPJPN 2025 – 2045 BPOM mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan.

Arah Kebijakan BPOM 2025 – 2029:

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan

pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi BPOM 2025 – 2029:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Organisasi/Satker

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan periode 2025 - 2029, ditentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan

Balai POM di Balikpapan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

3.2.2 Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melakukan Analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Balikpapan**

Penguatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *post market* (produk pasca mendapatkan NIE). Penguatan pengawasan ini bertujuan agar terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan, meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana sediaan farmasi dan pangan olahan, meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan serta pelayanan publik.

Proses komprehensif pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemberian izin edar merupakan syarat paling utama untuk memastikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang akan diedarkan telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk. Oleh karena itu sediaan farmasi dan pangan olahan yang akan diedarkan harus diregistrasikan ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan.

i. Pengawasan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko
- Meningkatkan komitmen pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang dikembangkan oleh BPOM serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana produksi, *track record* sarana produksi,

analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan.

- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi, terlebih untuk sarana produksi yang prosedur perizinan sarana produksi ada pada lintas sektor.
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

ii. Pengawasan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kepatuhan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko
- Meningkatkan komitmen pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana distribusi, analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan
- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi, terlebih untuk sarana distribusi yang prosedur perizinan sarana distribusi ada pada lintas sektor.

- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

c. Sampling dan Pengujian

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan dengan sampling produk beredar sesuai dengan analisis resiko dan pedoman sampling yang baik. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan, meliputi nomor izin edar, kadaluarsa produk, kondisi fisik yang bebas dari kerusakan serta ketentuan label/penandaan yang selanjutnya akan dilakukan pengujian secara laboratorium. Pengujian produk akan dilakukan oleh Laboratorium yang berada di Regional Samarinda, yaitu Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Palangka Raya. Pada akhir tahun 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sudah mulai melakukan pengujian obat level I (dengan menggunakan rapid test) dan melakukan pengujian sederhana makanan (rapid test).

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang sediaan farmasi

dan pangan olahan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- b. Pemberantasan kejahatan melalui patroli cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mengawasi secara daring.
- c. Intelijen di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menghasilkan profil kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan dan Makanan bersama lintas sektor dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Sistem Peradilan Pidana.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan harus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum di daerah dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana yang optimal.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan. Dengan adanya kesadaran pelaku usaha dapat mempercepat hilirisasi produk secara percaya diri serta mendorong pengembangan produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam strategi ini, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melakukan beberapa hal yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha agar dapat terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah

satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu.

- b. Mendorong peningkatan Industri sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional. Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Pembinaan dapat berperan sebagai upaya preventif mengingat UMKM sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran strategis dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang mana diharapkan dapat memilih dan menggunakan sediaan farmasi dan pangan olahan yang memenuhi standar. Oleh karena itu masyarakat diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan

memberikan informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di sekitarnya. Pemberian informasi itu melalui nomor telepon kantor, nomor narahubung dan media sosial Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu:

- a. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
- b. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial dan media elektronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
- c. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui layanan pengaduan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan seperti media sosial maupun pesan whatsapp.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Strategi ini merupakan upaya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melakukan koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun networking yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan berfokus pada peningkatan kualitas *government process* dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Dengan pengujian yang andal, BPOM diharapkan akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan dalam hal pengawasan. Dukungan pengujian diperlukan untuk pengawasan yang memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar.
- d. Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, salah satunya terkait dengan Perencanaan Pembangunan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Perencanaan tersebut dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Hingga saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi dan belum *up to date*.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola/bisnis proses Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Balikpapan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik
--	--

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, Dan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan 2025-2029

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Balikpapan juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Balikpapan mencakup pengawasan *premarket* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *premarket* control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Balikpapan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM dan Indikator Kinerja Utama dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan periode lima tahun. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai POM di Kota Balikpapan tahun 2025-2029 tergambar dalam tabel 4.1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.5	82.75	84	85.25	86.5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	27	28	29	30
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	90

	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	89.5	89.5	89.65	89.75	89.9
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90.25	91.5	92.5	94
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	94	95.25	96.75	97.5
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.2	92.2	93.2	94.2	95.6
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	9	11	13	15
	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33.33	66.67	100	100	100

		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.5	87.36	88.23	89.09	89.96
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Kemanan Dan Mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18.18	36.36	54.55	75.76	100
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	95	96	97	98
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
8	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	75	75.16	75.33	75.49
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	-	-	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	77.2	77.5	78	78.5	78.75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5

		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.35	2.40	2.45	2.50	2.55
--	--	-------------------------------------	------	------	------	------	------

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan tahun 2025-2029.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan periode 2025-2029 adalah seperti pada Tabel 4.2-4.3:

Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,371	1,457	1,529	1,605	1,685
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,663	3,847	4,039	4,241	4,453
TOTAL	5,034	5,304	5,568	5,846	6,138

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Berdasarkan Kegiatan 2025-2029

Berdasarkan Sumber

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	5,034	5,304	5,568	5,846	6,138
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	5,034	5,304	5,568	5,846	6,138

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Berdasarkan Sumber 2025-2029

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dalam kurun waktu 2025-2029 serta mendukung dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025 2029, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sebagai salah satu UPT BPOM sebagai UPT yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan dalam mencapai kinerja optimal dalam Pengawasan Obat Dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan. Dokumen ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di Lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Acuan dalam perencanaan kinerja dibuat untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan. Untuk Memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Diharapkan semua bagian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan dapat melaksanakan semua sasaran strategis dan target kinerja dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Guna mendukung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjamin keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat untuk pelaku industri.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Balikpapan								5,034	5,304	5,568	5,846	6,138	BPOM di Balikpapan	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1,371	1,457	1,529	1,605	1,685	BPOM di Balikpapan	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		BPOM Balikpapan										BPOM di Balikpapan	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.5	82.75	84	85.25	86.5					BPOM di Balikpapan	
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-	27	28	29	30					BPOM di Balikpapan	
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	88	89	90	91					BPOM di Balikpapan	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					BPOM di Balikpapan	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	86	87	88	90					BPOM di Balikpapan	

6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		89.5	89.5	89.65	89.75	89.9						BPOM di Balikpapan
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	90.25	91.5	92.5	94						BPOM di Balikpapan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	91	93						BPOM di Balikpapan
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92.75	94	95.25	96.75	97.5						BPOM di Balikpapan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95						BPOM di Balikpapan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		91.2	92.2	93.2	94.2	95.6						BPOM di Balikpapan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84						BPOM di Balikpapan

13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						BPOM di Balikpapan
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	9	11	13	15						BPOM di Balikpapan
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		33.33	66.67	100	100	100						BPOM di Balikpapan
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	81	82	83	84						BPOM di Balikpapan
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		-	45	50	50	50						BPOM di Balikpapan
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		78	78	90	99	109						BPOM di Balikpapan
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		152	155	163	172	181						BPOM di Balikpapan
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		19	16	17	19	21						BPOM di Balikpapan
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan		237	254	274	296	318						BPOM di Balikpapan

	Makanan yang Diperiksa oleh UPT												
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		-	144	144	144	144						BPOM di Balikpapan
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		-	170	170	170	170						BPOM di Balikpapan
	Meningkatnya efektivitas KIE	BPOM Balikpapan											BPOM di Balikpapan
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86.5	87.36	88.23	89.09	89.96						BPOM di Balikpapan
2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6						BPOM di Balikpapan
3	Jumlah desa pangan aman		1	1	2	3	3						BPOM di Balikpapan
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		142	150	200	250	275						BPOM di Balikpapan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		8	8	9	10	11						BPOM di Balikpapan

	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6						BPOM di Balikpapan
	RO 4: Desa Pangan Aman		1	1	2	3	3						BPOM di Balikpapan
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	BPOM Balikpapan											BPOM di Balikpapan
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		18.18	36.36	54.55	75.76	100						BPOM di Balikpapan
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		6	6	6	7	8						BPOM di Balikpapan
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	BPOM Balikpapan											BPOM di Balikpapan
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		94	95	96	97	98						BPOM di Balikpapan
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		1	1	2	2	2						BPOM di Balikpapan
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	BPOM Balikpapan											BPOM di Balikpapan

	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					BPOM di Balikpapan
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15					BPOM di Balikpapan
	Layanan Publik UPT yang prima		BPOM Balikpapan										BPOM di Balikpapan
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.2	4.3	4.4	4.5	4.6					BPOM di Balikpapan
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			12	25	21	29	36					BPOM di Balikpapan
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		BPOM Balikpapan										BPOM di Balikpapan
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		-	75	75.16	75.33	75.49					BPOM di Balikpapan
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		77.2	77.5	78	78.5	78.75					BPOM di Balikpapan
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5					BPOM di Balikpapan
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.35	2.40	2.45	2.50	2.55					BPOM di Balikpapan
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	-	-	-	-					BPOM di Balikpapan

	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								3,663	3,847	4,039	4,241	4,453	BPOM di Balikpapan
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						BPOM di Balikpapan

Terdapat penurunan target dari tahun 2025 ke 2026 untuk indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Hal ini dikarenakan Balai POM di Balikpapan mengalami kenaikan/ peningkatan status dari Loka menjadi Balai di pertengahan tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai pemenuhan Lab di tahun 2026-2029 menggunakan Tools Balai/ Laboratorium Tingkat 2.